

PENJUALAN BARANG IMPOR PADA E-COMMERCE: STUDI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM

Boma Wikan Rekso Prasajo

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. UMKM setidaknya berkontribusi hingga 60% terhadap PDB Nasional. Sampai saat ini, UMKM masih belum berada pada puncak potensinya. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan UMKM sebagai “senjata utama” untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dengan memaksimalkan potensinya. Salah satu strategi pemerintah dalam memaksimalkan potensi UMKM adalah dengan mendorong para pelaku UMKM untuk mendigitalisasikan usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Akan tetapi, para pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital ini terancam karena adanya fenomena gempuran barang impor yang masuk ke dalam PMSE. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur pendorongan digitalisasi UMKM, mengatur penjualan barang impor pada e-commerce, dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM atas gempuran penjualan produk impor pada e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dalam hal mendorong digitalisasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, dalam hal mengatur penjualan produk impor pada e-commerce, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan atau peraturan. Dalam hal memberikan perlindungan hukum atas fenomena gempuran barang impor yang baru terjadi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, mengundang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diharap bisa menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dalam perjalanan menulis penelitian ini, penulis berpendapat bahwa dalam hal mendorong digitalisasi UMKM diperlukan intensifikasi upaya digitalisasi melalui program pelatihan dan insentif yang dilakukan oleh pemerintah, dan peraturan yang berpihak kepada UMKM. Selain itu, penulis berharap pemerintah bisa memitigasi dampak dari fenomena seperti ini.

Kata kunci: UMKM; Barang Impor; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

THE SALE OF IMPORTED GOODS ON E-COMMERCE PLATFORMS: A STUDY ON LEGAL PROTECTION FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

Boma Wikan Rekso Prasajo

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become a cornerstone of Indonesia's economy, contributing at least 60% to the National Gross Domestic Product (GDP). However, MSMEs have yet to reach their full potential. Therefore, the government has designated MSMEs as the "main weapon" for developing Indonesia's economy by maximizing their potential. One of the government's strategies to unlock the potential of MSMEs is by encourage entrepreneurs in this sector to digitize their businesses by entering the Trading Ecosystem through the Electronic System (E-commerce). Nevertheless, MSMEs engaged in this digital ecosystem are at risk due to the phenomenon of imported goods flooding the e-commerce. Hence, the aim of this research is to examine how the Indonesian government, as a regulator, manages the push for the digitalization of MSMEs, regulates the sale of imported goods on e-commerce platforms, and elucidates the legal protection for MSMEs against the surge in sales of imported products on e-commerce platforms. This study employs a normative juridical method with a case approach and an analysis through descriptive-analytical methods of legislation. The findings reveal that the government has fulfilled its role in promoting digitalization as mandated by the Cipta Kerja Law. Additionally, concerning the regulation of the sale of imported products on e-commerce platforms, the government has instituted several policies and regulations. To provide legal protection against the recent influx of imported goods, the Ministry of Trade has enacted Ministerial Regulation No. 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trade Through Electronic Systems. This regulation is expected to foster fair competition and enhance the competitiveness of domestic products. Throughout the research, the author contends that encouraging the digitalization of MSMEs requires intensified efforts through training programs and incentives provided by the government, along with regulations favoring MSMEs. Furthermore, the author hopes that the government can mitigate the impact of such phenomena on MSMEs.

Keywords: MSMEs; Imported Goods; Regulation of the Indonesian Minister of Trade Number 31 of 2023.